

WATAK POLITIK DAN DIPLOMASI API ARAB SAUDI

Purkon Hidayat

Indonesia Center for Middle East Studies (ICMES)
purkonhidayat@ic-mes.org

Abstract

This paper seeks to track the political nature behind the decision of Saudi Arabia Kingdom of Saudi executes Shia cleric, Nimr Baqir Al-Nimr using speech act theory. It is not a coincidence when the execution of the Nimr conducted before implementation JCPOA, reached Iran with 5+1 group and the European Union. The Saudi political action born out of political character that is both personal and tribal. This paper provides a theoretical reinforcement to the previous related research, especially Hermann Frederick Eilts about the foreign policy of Saudi Arabia, also Philip S. Khoury and Joseph Kostiner that highlights the state's formation and patterns of tribal Arab country. Tracking model of diplomacy fire that relies on oil (money) and sword (military), a bit much to contribute about the urgency of understanding the political nature, including the style of diplomacy, as large maps to analyze the political action of the actors Arab kingdom of Saud in responding to the political dynamics of regional and global.

Keywords: Speech Act, Political Nature, Personal, Tribal

Abstrak

Tulisan ini berusaha melacak watak politik dibalik keputusan Kerajaan Arab Saudi mengeksekusi ulama Syiah dari Saudi, Nimr Baqir Al-Nimr dengan menggunakan teori *speech act*. Bukan sebuah kebetulan ketika eksekusi mati terhadap Nimr dilakukan menjelang implementasi JCPOA, yang dicapai Iran dengan kelompok 5+1 dan Uni Eropa. Aksi politik Saudi tersebut lahir dari watak politik yang bersifat personal dan tribal. Tulisan ini memberikan penguatan teoritis terhadap riset terkait sebelumnya, terutama Hermann Frederick Eilts tentang kebijakan luar negeri Arab Saudi, juga Philip S. Khoury dan Joseph Kostiner yang menyoroti formasi negara dan pola tribal negara Arab. Pelacakan model diplomasi api yang bertumpu pada minyak (uang) dan pedang (militer), sedikit banyak memberi kontribusi tentang urgensi pemahaman watak politik, termasuk gaya diplomasinya, sebagai peta besar untuk menganalisis aksi politik para aktor kerajaan Arab Saud dalam merespon dinamika politik regional dan global.

Kata Kunci: *Speech Act*, Watak Politik, Personal, Tribal

Pendahuluan

Di ranah disiplin ilmu Hubungan Internasional, Nicholas Greenwood Onuf mengemukakan teori tentang speech act mengenai hubungan saling mempengaruhi agen-struktur yang berlangsung dalam sebuah lingkaran interaksi. Subjek menciptakan dan mempengaruhi struktur, demikian sebaliknya struktur mempengaruhi subjek. Sebab oranglah yang membuat aturan, lalu aturan mengatur masyarakat, dan aturan masyarakatlah yang menjadikan orang melakukannya sendiri dengan cara-cara tertentu. Sebagaimana diungkapkan Onuf dalam *World of Our Making: Rules and Rule in Social Theory and International Relations* (1989:66), "People make rules, rules make society, society's rules make people conduct themselves in specified ways."

Onuf (1989:66) memandang manusia -terutama para politikus- dalam membangun realitas melalui aksinya berupa tindakan riil maupun speech act. Tindakan dan statemen yang berulang-ulang membentuk rules bagi aktor lainnya. Statemen para politisi menjadi rules yang hanya memberikan dua pilihan bagi aktor politik lain, mengikutinya atau tidak, tentu dengan konsekuensinya masing-masing.

Kacamata Onuf ini membantu untuk melacak watak politik penguasa Arab Saudi dari aksi politiknya mengeksekusi mati Nimr Baqir al-Nimr yang dilakukan tepat di hari kedua tahun baru 2016. Pasalnya, eksekusi mati al-Nimr tidak lahir dari keputusan murni urusan dalam negeri Arab Saudi yang berkaitan dengan keamanan nasionalnya, tapi lebih banyak dipengaruhi faktor eksternal, terutama sebagai reaksi terhadap dinamika regional dan global.

Eksekusi mati Al-Nimr terjadi di tengah semakin meredanya ketegangan antara Iran dan Barat dalam masalah nuklir dengan dicapainya kesepakatan nuklir antara Iran dengan kelompok 5+1 dan Uni Eropa di Wina. Kesepakatan yang dicapai kedua pihak pada 14 Juli 2015 itu melahirkan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) yang akan

melonggarkan sanksi Barat yang telah dijatuhkan terhadap Iran selama bertahun-tahun. Bukan sebuah kebetulan jika eksekusi mati Al-Nimr dilakukan sekitar dua pekan sebelum implementasi JCPOA pada 16 Januari 2016. (<http://www.irna.ir/fa/News/81923180/>)

Selama lebih dari tiga dekade pasca kemenangan Revolusi Islam di Iran, Arab Saudi dan kebanyakan negara Arab lainnya di kawasan Teluk Persia menikmati dukungan besar dari AS. Pada saat yang sama, pengucilan Iran oleh Barat menguntungkan dominasi Arab Saudi di kawasan. Oleh karena itu, ketika Barat mulai merapat dengan Iran, muncul kekhawatiran Riyadh terhadap menguatnya pengaruh Iran di kawasan Timur Tengah. Aksi politik Saudi mengeksekusi mati Al-Nimr sebagai reaksi atas transformasi regional Timur Tengah (dan global) memunculkan pertanyaan besar mengenai watak politik yang melandasi sepak terjang politik dan gaya diplomasi kerajaan Arab Saudi.

Melacak Watak Politik Saudi

Sekitar dekade enam puluh, Dean Acheson (1893-1971) pernah mengatakan bahwa tujuan nasional Kerajaan Arab Saudi, sebagaimana negara lain, untuk bertahan hidup maupun mencapai kemakmuran, tapi harus menambahkan syarat di bawah dinasti Al Saud. Hermann Frederick Eilts menempatkan statemen menteri Luar Negeri AS di era presiden Harry S Truman ini sebagai entry point untuk memahami watak politik Arab Saudi, termasuk kebijakan luar negeri, bahkan gaya diplomasinya (Brown, 2004: 219).

Ditinjau dari tujuan nasionalnya, penguasa kerajaan Arab Saudi mendefinisikan tujuan nasional negara Arab itu dalam kerangka kepentingan dinasti Al Saud. Meskipun Arab Saudi mengadopsi institusionalisasi politik dalam piramida kekuasaannya, tapi coraknya bersifat tribal dan personal (Philip S. Khoury and Joseph Kostiner, 1987). Syura yang disebut sebagai alternatif demokrasi Barat, atau Bedouin Democracy, tidak lebih dari perkumpulan para pangeran dinasti Al Saud ditam-

bah ulama Wahabi. Menurut Fred Haliday, bentuk kelembagaan politik ini tidak menjelaskan karakter negara modern (Halliday, 2005:44).

Penyelidikan antropologi menunjukkan tatanan sosial yang berlaku di Semenanjung Arab selama berabad-abad didasarkan pada sentralitas suku dalam kehidupan masyarakat Arab. Sekelompok orang berbagi wilayah teritorial yang dikuasainya, dan kepentingan ekonomi mereka pun didukung hubungan kekerabatan. Kesetiaan politik para anggota terhadap kepala suku akan menerima perlindungan fisik dan ekonomi dan status sosial. Bagaimanapun, sebuah suku tidak berbentuk struktur monolitik tapi terbagi menjadi sub unit berupa: keluarga, klan, dan faksi yang lebih besar. Solidaritas kolektif (ashabiyah) terungkap melalui kohesi militer dan ekonomi. Pola tersebut masih berlaku hingga kini dalam bentuk yang lebih sistematis dan besar dengan dominasi suku Al Saud di atas suku-suku lainnya di Arab Saudi (Kostiner, 1993:16-17).

Dengan struktur sosial demikian, tidak heran jika suara rakyat sangat kurang memiliki tempat dalam pengambilan keputusan politik di negara Arab itu. Selain itu, pos-pos penting kekuasaan Arab Saudi selalu diisi para pangeran dinasti Al Saud, maupun orang-orang yang berafiliasi dengan raja dan putra mahkota. Misalnya, gubernur Mekah dijabat Khalid al-Faisal Al Saud. Sebelumnya dijabat oleh Mishaal bin Abdullah Al Saud, yang juga seorang pangeran.

Riset Askari menunjukkan watak politik penguasa Arab Saudi yang bersifat personal. Hal ini terindikasi dengan tipisnya dinding antara kas negara dan rekening pribadi untuk memenuhi kebutuhan penguasa yang nyaris tanpa batas (Askari, 2009:107-108).

Pelacakan watak politik rezim Al Saud yang bersifat personal dan tribal ini membantu memahami motif eksekusi mati Al-Nimr.

Pertama, eksekusi mati Al-Nimr sebagai cara dinasti Al Saud untuk memberangus gerakan protes rakyat yang semakin deras sejak 2011 lalu, terutama di heart land yang kaya minyak di wilayah timur. Pemancungan Al-Nimr mengirimkan sinyal kepada seluruh oposisi pemerintah Riyadh supaya menghentikan aksinya menentang kerajaan Al Saud. Riyadh saat ini hanya memberi dua opsi; mentaati Al Saud, atau diberangus.

Barangkali tidak penting bagi Riyadh untuk membedakan, apakah Nimr memberontak dengan mengangkat senjata, atau hanya berteriak di podium dengan kata-katanya untuk sekedar menyuarakan ketertindasan rakyat yang menuntut hak legalnya. Sebab yang ada hanyalah narasi tunggal tentang tafsir berbangsa dan bernegara menurut definisi Al Saud, bukan liyan.

Sejak sekitar lima tahun lalu, corak politik personal ini begitu dominan dalam berbagai aksi represif Al Saud menyikapi gelombang protes damai rakyat di wilayah timur yang menyerukan penegakkan keadilan dan demokratisasi.

Watak politik personal, sebagaimana dianut Saudi, ditentukan oleh siapa yang berkuasa sebagai Raja, yang melampaui sistem ketatanegaraan maupun undang-undang yang berlaku. Salah satu karakteristik sistem pemerintahan monarki absolut adalah corak personalnya yang kental. Keputusan raja adalah undang-undang, dan bisa membatalkan aturan, bahkan mengubahnya.

Selain itu, dari perspektif psikologi sosial masyarakat Timur Tengah, corak politik tribal menunjukkan Al Saud mau hanya berinteraksi dengan para pemimpin puncak, bukan anggota masyarakat atau representasinya melalui pemilu. Apabila pemimpin sebuah suku bisa diajak kompromis, maka akan jadi sekutu, tapi apabila menolak maka harus disingkirkan dan diperangi. Watak tersebut masih tetap lestari hingga kini.

Ketika Al-Nimr sebagai pemimpin Syiah Saudi tidak bisa dibungkam supaya diam, maka jalan yang dipilih Al Saud adalah memberangusnya. Selain itu, studi antropologi politik Timur Tengah menunjukkan perlawanan-perlawanan suku tidak pernah berlanjut panjang ketika pemimpinnya mati, kecuali memiliki pemimpin kharismatik lainnya yang setara atau lebih baik.

Pendekatan ini sekaligus menjelaskan mengapa antara sesama negara Arab sendiri saling bermusuhan demi memperebutkan dominasi regional, sebagaimana dilakukan Saudi terhadap Yaman, Suriah maupun Irak. Di sisi lain, masalah ini mengindikasikan bahwa demokrasi yang menyuarakan kepentingan rakyat kebanyakan, dipandang sebagai ancaman kepentingan nasional sebagian negara Arab semacam Saudi.

Kedua, eksekusi Nimr mengirim pesan penting kepada Tehran pasca tercapainya kesepakatan nuklir antara Iran dengan kelompok 5+1 pada Juli 2015. Riyadh memandang Tehran sebagai rival utama bagi posisinya mendominasi Timur Tengah. Watak politik Al Saud yang bersifat tribal cenderung ambisius yang ingin menjadikan dirinya sebagai penguasa paling berpengaruh di kawasan Timur Tengah (Asia Barat).

Studi antropologi Timur Tengah menggambarkan tingginya persaingan antar suku di kawasan ini demi memperebutkan dominasi regional. Dinasti Al Saud sendiri menguasai Hijaz, dengan kota utamanya Jeddah, Mekah dan Madinah, melalui pertumpahan darah dalam pertempuran yang dikenal dengan "Perang Mekah" di tahun 1924.

Sejak dahulu, watak politik Arab yang bersifat personal dan tribal ini telah dibaca dan dimanfaatkan dengan amat baik oleh Imperialis semacam Inggris dan kini AS, demi kepentingan ekonomi politiknya sendiri. Ketika itu, seorang arkeolog sekaligus diplomat Inggris bernama Thomas Edward Lawrence melancarkan provokasi asimetri yang melahirkan pemberon-

takan terhadap Imperium Ottoman, dan terpisahnya Hijaz di tahun 1916.

Seperti yang terjadi di Suriah, Irak maupun Yaman dewasa ini, dahulu pun bangsa-bangsa Arab dengan watak personal dan tribalnya begitu gampang diadu domba oleh seorang Lawrence lebih dari seabad lalu. Ilmuwan dan diplomat Inggris ini memainkan peran besar dalam perang Aqaba di tahun 1917, perang Tafilah di tahun 1918, dan Perjanjian Sykes-Picot di tahun 1916 antara Inggris dan Prancis, yang membagi wilayah kekuasaan Ottoman Turki menjadi terpecah-pecah. Bahkan hingga kini, negara-negara Arab di kawasan Timur Tengah begitu bergantung terhadap Barat, terutama Inggris dan AS.

Apabila seabad lalu konflik yang disulut Inggris terhadap bangsa-bangsa Arab adalah musuh bersama Ottoman, kini berganti nama menjadi Iran, dan dilakukan bukan hanya Inggris, tapi AS sebagai aktor barunya. Tujuan imperialis pun tidak berubah dari dulu hingga kini demi menguasai sumber daya alam yang melimpah. Selain itu, negara-negara imperialis itu mendulang untung dari penjualan senjata dalam perang yang mereka kobarkan di kawasan. Lebih dari itu berhasil mengadu domba umat Islam.

Watak politik rezim Al Saud yang bercorak personal dan tribal mudah mengadopsi narasi besar “Iranophobia” yang digembar-gemborkan Barat, terutama AS dan Inggris, dan Israel. Bagi negara Arab seperti Saudi, Iran pasca kemenangan Revolusi Islam adalah biang kerok di kawasan.

Selama lebih dari tiga dekade, Saudi mengamini AS dan Inggris dengan melakukan berbagai cara demi meredam pengaruh Republik Islam Iran. Dukungan Riyadh bersama Barat dan sejumlah negara Arab terhadap Saddam Husein dalam perang dengan Iran tahun 1980-1988 tidak membuahkan hasil. Bahkan, beberapa tahun kemudian, Saddam digulingkan sendiri oleh AS yang dahulu mendukungnya, melalui invasi militer tahun 2003, dan Saddam sendiri tewas dieksekusi pada 30 Desember 2006.

Tidak hanya itu, Saudi juga melancarkan intervensi di banyak negara kawasan demi mewujudkan ambisinya, termasuk mendukung kelompok teroris semacam ISIS yang beroperasi di Suriah dan Irak. Arab Saudi juga melancarkan agresi militer di Yaman untuk memprovokasi Iran, dan sebelumnya di Bahrain.

Ketiga, watak politik Saudi yang bersifat personal dan tribal sangat kental dalam representasi kolektif yang dikumandangkan rezim Al Saud secara gegap gempita. Eksekusi mati Al-Nimr dilakukan untuk memperkuat posisi representasi kolektif Arab Saudi di kalangan negara-negara Arab dan dunia Islam demi meredam pengaruh Iran.

Representasi kolektif tersebut sedikit bisa digali dengan analisis Durkheimian tentang cara bertindak dari elaborasi kolektif melalui aturan hukum yang bersifat otoritatif (Durkheim, 1982, dan Ceri, 1993:135-152). Tujuannya untuk menggalang kesadaran kolektif sektarian dari nilai-nilai subjektif yang ditanam Saudi dengan menggalang solidaritas suku Arab dan Sunni, sebagai lawan Iran. Saudi menggunakan solidaritas eksklusif (ingroup solidarity) untuk menggiring konfrontasi bersama dunia Islam Sunni demi mendestabilisasi Iran yang ditempatkan sebagai outgroup. Oleh karena itu, pola komunikasi yang dipakai adalah “kita” dan “mereka”, atau propaganda “Syiah bukan Islam” dan lain-lain.

Ketika skenario ini dijalankan oleh Saudi, sebetulnya Riyadh sedang mengimplementasikan plot imperialis untuk mengkotak-kotakan dunia Islam dalam kavling ketegangan politik sektarian, sekedar untuk melayani ambisi dominasi regional rezim Al Saud dan hidden agenda Barat, terutama AS, yang memiliki kepentingan ekonomi politik di balik konspirasi itu.

Tampaknya, sebagai penguasa kerajaan Arab Saudi, rezim Al Saud mengideologikan nilai-nilai yang dibuatnya sendiri. Dengan berlakunya nilai-nilai tersebut dalam bernegara, maka kepemimpinannya menjadi kokoh. Dan sebaliknya, entah

Sunni atau Syiah, setiap kekuatan oposisi semacam Sheikh Nimr akan dilenyapkan demi menjaga status quo Al Saud.

Keputusan rezim Al Saud mengeksekusi mati Al-Nimr juga tidak bisa dilepaskan dari dukungan “cek kosong HAM” Barat. Terpilihnya Saudi sebagai panel Dewan HAM PBB (UNHRC) periode 2014-2016 sebagai kedok sepak terjangnya. Bahkan The Independent menyebut ada kesepakatan terselubung antara Inggris dan Arab Saudi mengenai masalah ini. (<http://www.huffingtonpost.com>)

Berbagai lembaga HAM dunia telah menjelaskan deretan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Saudi. Yang terbaru, Human Rights Watch (HRW) melaporkan Arab Saudi menggunakan senjata terlarang, bom cluster jenis CBU-58 yang diproduksi oleh pabrik senjata di negara bagian Tennessee, AS pada tahun 1978 untuk menghantam wilayah pemukiman penduduk di sekitar Sanaa, ibu kota Yaman. (<https://www.hrw.org/news/2016/01/07/>)

Diplomasi Api: Minyak dan Pedang

Korany dan Dessouki (1984) menjelaskan empat komponen kebijakan luar negeri sebagai titik awal analisis berupa lingkungan domestik, orientasi kebijakan luar negeri, proses pengambilan keputusan proses dan perilaku (Halliday, 2005:28). Dalam konteks kebijakan luar negeri kerajaan Arab Saudi keempat faktor tersebut menjadi fungsi dari beberapa varian dengan faktor interaktif yaitu: identitas Arab dan statusnya sebagai entitas terbesar dari Semenanjung Arab; warisan Islam yang unik sebagai penjaga tempat-tempat suci Islam Mekah dan Madinah; sumber daya alam minyak bumi yang besar dan pengaruh keuangan internasional yang dihasilkannya (Eilts, 2004:222). Berbagai faktor tersebut bersama dukungan penuh politik dan militer Barat, terutama AS dan Inggris, menjadikan Kerajaan Arab Saudi semakin percaya diri untuk mengklaim sebagai kekuatan paling berpengaruh di kawasan Timur Tengah.

Studi Askari dkk, menunjukkan negara-negara Teluk Persia, khususnya Arab Saudi sebagai pelanggan utama industri militer global, terutama dari Amerika Serikat. Bahkan, produsen senjata dari berbagai negara bersaing keras untuk meraup keuntungan akses pasar senjata Teluk Persia yang sangat menguntungkan (Askari, 2009:105-107).

Watak politik Arab Saudi dijalankan secara sangat masif dalam bentuk diplomasi api yang menggunakan dua sarana, pedang (militer) dan minyak (uang). Diplomasi api tersebut mencapai puncaknya di era Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud, dan putranya yang masih muda menjadi menteri pertahanan, Mohammad bin Salman Al Saud.

Menyoroti militerisasi kerajaan Arab Saudi, laporan Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) menunjukkan posisi Arab Saudi bertengger di peringkat keempat negara dengan anggaran belanja militer terbesar di dunia setelah AS, Cina dan Rusia, senilai 80,8 miliar dolar di tahun 2014. Laporan SIPRI juga menunjukkan kenaikan anggaran sebesar 112 persen dari tahun 2005 hingga 2014 dengan presentasi sebesar 10,4 dari produk domestik bruto (PDB) negara Arab ini (SIPRI, 2014). Sedangkan International Institute for Strategic Studies menempatkan pengeluaran militer Arab Saudi di posisi ketiga di dunia dengan anggaran sebesar 80,8 miliar dolar dan kontribusi 10,7 persen dari PDB negara kaya minyak itu (International Institute for Strategic Studies, 2015).

Seluruh angka tersebut berdasarkan estimasi tahun 2014 yang belum mempertimbangkan biaya militer yang semakin membengkak untuk mendanai berlanjutnya perang di Suriah demi mendukung oposisi Assad, di Irak dan Yaman yang masih berlanjut hingga kini dengan bantuan langsung maupun tidak langsung AS dan Inggris. Selain menerjunkan penasihat militer, AS dan Inggris memasok senjata kepada Arab Saudi dalam perang Yaman.

Selain militer, diplomasi api yang dijalankan kerajaan Arab Saudi menggunakan minyak (uang) untuk mewujudkan kepentingan luar negerinya. Keputusan Arab Saudi meningkatkan pasokan minyaknya melebihi kuota hingga mendekati 11 juta barel perhari menyebabkan harga minyak terjun bebas di level terendah selama beberapa tahun terakhir. Meskipun di permukaan kebijakan tersebut untuk menahan laju Shale Oil AS, tapi laporan CNN menunjukkan bahwa Iran (dan Rusia) sebagai target utama kebijakan penurunan harga minyak Saudi tersebut.

Lalu, sampai kapan strategi ini akan terus berlanjut. Pasaunya, kebijakan tersebut justru menjadi bumerang bagi Riyadh sendiri. Nilai tukar Rial Arab Saudi yang selama ini dikenal kuat terkoreksi jatuh di level terendah sejak tahun 1999. Reuters (4/1/2016) melaporkan, nilai tukar satu dolar AS sebesar 680 Riyal Arab Saudi, padahal hari Kamis sebelumnya bertengger di level 425 Riyal. Selain itu, indeks harga saham gabungan bursa efek Saudi anjlok 2,4 persen.

Barangkali dalam kondisi ceteris paribus, semua variabel lain konstan, penurunan tersebut masih dianggap wajar. Tapi persoalannya, Arab Saudi mengalami defisit anggaran di APBN-nya yang terbesar selama beberapa dekade terakhir. Tahun lalu, IMF memprediksi defisit anggaran melebihi 400 miliar riyal atau setara \$ 107 miliar. Angka ini dihitung dengan pendapatan sektor minyak 81 persen, yang dikurangi dari sebelumnya sebesar 90 persen. Meski demikian, Samba Financial Group yang berbasis Riyadh memperkirakan pengeluaran negara akan naik sebesar 0,4 persen tahun 2016.

Menjelang akhir tahun 2015, Kerajaan Saudi memutuskan menaikkan harga bahan bakar hingga 50 persen demi mengatasi defisit anggaran sebesar US\$ 98 miliar, atau sekitar Rp 1.372 triliun. Majalah ekonomi Amerika Serikat, Forbes memuat tulisan Katie Sola, seorang analis ekonomi, tentang pemutusan hubungan diplomatik Riyadh-Tehran, yang akan

merugikan Arab Saudi milyaran dolar. Forbes, dalam laporannya terkait pemutusan hubungan Saudi dan Iran hari Selasa (5/1) mengungkapkan, jika pemutusan hubungan Teheran-Riyadh berujung dengan penghentian pengiriman jamaah haji Iran ke Saudi, Riyadh akan kehilangan sebagian besar pendapatannya.

Forbes menambahkan, setiap tahun 100 ribu jamaah haji Iran berkunjung ke Saudi dan menyumbang lima persen dari dua juta Muslim dunia yang berhaji ke Saudi pada tahun 2015. Majalah Amerika itu menegaskan bahwa haji sangat membantu perekonomian Saudi. Menurut Forbes, seorang ekonom Saudi menyatakan bahwa pendapatan Saudi dari haji dan umrah di tahun 2014 sebesar 18,6 milyar dolar, yang 8,5 milyar dolar pendapatan itu berasal dari haji. Oleh karena itu, jika angka itu diasumsikan untuk jamaah haji dan umrah Iran, maka Saudi akan merugi sebesar tiga milyar dolar.

Penutup

Diplomasi api pernah dijalankan secara masif oleh rezim Saddam Hossein yang dibantu Barat secara besar-besaran dalam perang dengan Iran tahun 1980 hingga 1988. Tapi kemudian AS berubah arah ketika Saddam berada di luar kendali dengan menyerang Kuwait yang memicu lahirnya sanksi PBB dan dimasukkannya Irak dalam pasal tujuh piagam PBB. Lalu, apakah nasib Arab Saudi di tangan Raja Salman bin Abdul Aziz akan seperti Irak di genggamannya Saddam yang ditinggalkan Barat? Barangkali waktu yang akan mengujinya.

Daftar Rujukan

- Askari, Hossein. *The Militarization of The Persian Gulf: An Economic Analysis*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited:2009.
- Bronson, Rachel. *Oil: America's Uneasy Partnership with Saudi Arabia*, Oxford Press: 2006.
- Brown, Anthony. *Oil, God and Gold: The Story of Aramco and the Saudi Kingdom*, Houghton Mifflin: 1999.
- Brown, L. Carl. *Diplomacy in The Middle East: The International Relations of Regional and Outside Powers*. London, I.B.Tauris:2004.

- Cleveland, William and Bunton, Martin. *A History of the Modern Middle East*, 4th edition. Westview: 2009.
- Durkheim, Emile. *The Rules of Sociological Method*, New York, The Free press: 1982.
- Dryzek, John. *The Oxford Handbook of Political Institutions*. Oxford University Press:2006.
- Eickelman, Dale F. *Middle East: An Anthropological Approach*. Prentice-Hall:1981.
- Halliday, Fred. *The Middle East in International Relations: Power, Politics and Ideology*. Cambridge University Press: 2005.
- International Institute for Strategic Studies. *The Military Balance 2015*. 11 February 2015. London: Routledge.
- Khalaf, Abdul Hadi dan Giacomo Luciana. *Constitutional Reform and Political Participation in the Gulf*, Dubai, Gulf Research Center:2006.
- Kostiner, Joseph. *The Making of Saudi Arabia, 1916-1936 : From Chieftaincy to Monarchical State*.Oxford University Press.1993.
- Onuf, Nicholas Greenwood. *world of Our Making: Rules and Rule in Social Theory and International Relations*, Columbia, University of South Carolina Press:1989.
- Philip S. Khoury and Joseph Kostiner, *The Conference on Tribes and State Formation in the Middle East*. Cambridge, Massachusetts: November 1987.
- Pitkin, Hanna Fenichel. *The Concept of Representation*. University of California Press:1997.
- Posner, Gerald L. *Secrets of the Kingdom: the Inside Story of the Saudi-U.S. Connection*, Random House: 2007.
- SIPRI. *Trend in The World Military Expenditure 2014: Fact Sheet April 2015*.
- Turner, Stephen P. *Emile Durkheim: Sociologist and moralist*, London, Routledge: 1993.
- <http://www.reuters.com/article/saudi-forex-tensions-idUSL8NI400E42-0160104> diakses Selasa 5 Januari 2016.
- <http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-16/-50-oil-puts-saudi-budget-deficit-beyond-reach-of-spending-cuts>. diakses Rabu 6 Januari 2016.
- <http://katadata.co.id/berita/2015/12/29/defisit-rp-1372-triliun-arab-saudi-naikkan-harga-bbm>. diakses, Rabu, 6 Januari 2016.

- <http://katadata.co.id/berita/2015/09/15/perang-harga-minyak-kekalahan-amerika-dan-kemenangan-opec> diakses Minggu, 31 Januari 2016.
- http://www.huffingtonpost.com/entry/saudi-arabia-executions-human-rights-council_us_56884809e4b06fa6888293d1, diakses Jumat, 29 Januari 2016.
- <http://www.theguardian.com/uk-news/2015/sep/29/uk-and-saudi-arabia-in-secret-deal-over-human-rights-council-place>, diakses Minggu, 31 Januari 2016
- <http://www.globalresearch.ca/united-nations-farce-saudi-arabia-to-head-un-human-rights-council/5477833> diakses Sabtu, 30 Januari 2016.
- <https://www.hrw.org/news/2016/01/07/yemen-coalition-drops-cluster-bombs-capital-0> diakses Jumat, 29 Januari 2016.
- <https://www.rt.com/news/328190-yemen-saudi-cluster-bombs/> diakses Jumat, 29 Januari 2016.
- <http://www.stopclustermunitions.org/en-gb/cluster-bombs/use-of-cluster-bombs/cluster-munition-use-in-yemen.aspx>. diakses Sabtu, 30 Januari 2016.
- http://www.nytimes.com/2016/01/24/world/middleeast/us-relies-heavily-on-saudi-money-to-support-syrian-rebels.html?_r=0 diakses Minggu 31 Januari 2016.
- <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/11/yemen-coalition-used-uk-cruise-missile-in-unlawful-airstrike/> diakses Minggu 31 Januari 2016.
- <https://www.rt.com/uk/328259-military-uk-saudi-arabia-yemen/> diakses Minggu, 31 Januari 2016.